



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHALUL AZAM
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 164798

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.456.375.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m²/60 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 397.300.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/280 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m²/79 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 320 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.940.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m²/24 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 540.200.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 628.475.000
7. Tanah Seluas 663 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 760.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA ZENIX HYBRID TYPE V MPV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 215.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.353.559.518
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.784.934.518
III. HUTANG	Rp.	381.773.371
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.403.161.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.